

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan dan bahan tulisan, penulis mencantumkan berbagai *literatur* dan penelitian terdahulu (*Prior research*) yang masih relevan dengan objek penelitian ini. Selain itu menjadi syarat yang mutlak sebagai bentuk plagiat atau menyalin secara utuh hasil karya tulis orang lain. Oleh karena itu untuk mematuhi kode etik dalam penulisan karya ilmiah maka sangat diperlukan suatu bahan bandingan atau (*Eksplorasi*) terhadap penelitian yang terdahulu. Adapun tujuan dari hasil perbandingan atau eksplorasi untuk menegaskan kembali, kefasihan penelitian dan sebagai bahan pendukung dalam menyusun konsep berpikir penelitian.

Berdasarkan hasil pencarian dan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu menemukan ada beberapa kesamaan dalam bahasan, namun penelitian ini berbeda terhadap penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu: Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia sebagai upaya peningkatan penanaman modal dan daya saing International, yang ditulis oleh Valenshia Destaningtyas Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. dalam tulisan ini membahas Tanjung Api- Api menuju kawasan ekonomi khusus di Indonesia, selain sebagai percepatan pembangunan nasional kawasan ekonomi khusus juga sebagai pemerataan penanaman modal dan investasi di berbagai wilayah Indonesia.¹¹

¹¹ Destaningtyas Valenshia, Kawasan ekonomi khusus di Indonesia sebagai peningkatan penanaman modal dan daya saing, Jakarta: Jurnal Nasional. Hlm 15 diakses melalui [Http://lib.ui.ac.id.com](http://lib.ui.ac.id.com)

Data menunjukkan untuk pembangunan nasional dan penanaman modal hanya terjadi dengan baik di wilayah pulau Jawa dengan presentasi 80 % dan hal ini menunjukkan bahwa minat penanaman modal di luar pulau Jawa masih terbilang jauh peminat, jika dilihat dari sudut pandang negara pentingnya kawasan ekonomi khusus menjadi strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan pembangunan nasional untuk serta memaksimalkan aliran masuknya modal dan tidak hanya itu kawasan ekonomi khusus akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional di Indonesia pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Alasan penulis memilih penelitian ini sebagai bahan referensi adalah karena penelitian ini berfokus pada penanaman modal atau investasi langsung dilakukan oleh Tiongkok dalam kawasan industri Tanjung Api-Api sebagai zona kawasan ekonomi khusus di Indonesia, dimana pada dasarnya pembangunan industri dan pembangunan nasional selalu di fokus pada ibu kota sebagian pulau Jawa, maka dengan itu ada Semangat dari Pemprov Sumatera Selatan memang patut dihargai dalam menjadikan Tanjung Api-Api sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus Indonesia.

Telah terpenuhinya persyaratan mengenai lokasi kandidat kawasan ekonomi khusus Indonesia di Tanjung Api-Api sebagaimana yang disyaratkan dalam UU kawasan ekonomi khusus disertai dengan melimpahnya potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan menjadikan Tanjung Api-Api sebagai salah satu kandidat terkuat dalam pembentukan kawasan ekonomi khusus Indonesia. Walaupun terdapat keterbatasan infrastruktur, akan tetapi hal itu tidak menjadi kendala karena adanya dukungan yang nyata dari Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Sumatera Selatan dalam menambah infrastruktur serta sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan, rel kereta api dan menambah pasokan listrik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini lebih menekankan pada penanaman modal asing di Indonesia dimana harus adanya situasi kondusif dari negara penerima modal dalam menentukan arus laju penanaman modal, dimana guna mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung penanaman modal di perlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai biaya yang harus di keluarkan untuk mengoperasikan sebuah perusahaan, dimana untuk penanaman modal di butuhkan supremasi hukum (*rule of law*). Dengan hal tersebut maka adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam penegekan hukum dan kebijakan dalam penanaman modal di harapkan dapat menciptakan kepastian hukum sehingga dapat menciptakan kondisi atau situasi yang kondusif dan dapat menarik penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia.

Dan menurut Gokhan Akinchi dalam penelitian ini juga dijelaskan untuk mengoptimalkan kerangka hukum dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus yang optimal seharusnya mencantumkan tiga fakto utama yaitu, pertama harus dibentuknya untuk menghilangkan halangan yang ada dan hendaknya mencerminkan keuntungan korporatif negara yang bersangkutan, kedua sesuai dengan kebutuhan penanaman modal dalam negeri dan asing seperti isentif jasa dan kenyamanan dan yang ketiga paket jasa dan insentif yang di tawarkan mencerminkan pengalaman keberhasilan kawasan ekonomi khusus yang ada dan hendaknya kompetitif dalam kawasan tersebut.

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan ekonomi Khusus Bitung yang ditulis oleh Andi Tri Putranto dkk, menekan pada pembahasan kawasan ekonomi khusus akan meningkatkan produktif, berdaya saing, dan

fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan menggabungkan infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, inovasi dan kompetitif agar cepat melayani dalam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Tahun 2014, diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus Bitung yang menetapkan kawasan ekonomi khusus Bitung yang berlokasi di kecamatan Matuari, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas.¹²

Dengan lokasi yang sangat strategis dan geostrategis, kawasan ekonomi khusus Bitung diharapkan mendorong perikanan, farmasi dan menarik investasi asing ke daerah untuk dikelola dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh gubernur provinsi sulawesi utara nomor 6 tahun Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola kawasan ekonomi khusus Bitung. Agustus 2019, total komitmen investasi ke kawasan ekonomi khusus Bitung adalah sebesar Rp1,79 triliun. yaitu: PT Futai Sulawesi Utara, PT Indojoya Fortuna, PT Mapalus Makawanua, dan PT Puri Bitung investasinya yaitu PT Indojoya Fortuna sebesar Rp 350 miliar untuk membangun fasilitas pendingin (*cold storage*) dan PT Futai Sulawesi Utara senilai Rp1,4 triliun untuk membangun industri kertas daur Presiden Joko Widodo, meskipun secara organisasi didukung oleh kekuatan pemerintah pusat.¹³

Alasan penulis memilih karya tulis ini sebagai rujuk dalam penelitian ini karena memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya menurut laporan kedutaan besar China di Afrika Selatan (2018) mencatat bahwa 113 negara dan 29

¹² Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, yang di tulis oleh Andi Tri Putranto dkk, Vol. 1 No 1, 2001

¹³ CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi-investasi-senilai-rp18-triliun-serbu-kekbitung.com> . Diakses pada 7 April 2022

organisasi internasional telah menandatangani kesepakatan proyek BRI. Ini artinya bahwa lebih dari 50% jumlah negara dunia (total 193 negara) telah memberikan sinyal positif terhadap kebangkitan China. Dengan hal ini maka dapat ditarik beberapa point dalam penelitian ini pertama konsep tianxia ‘all under heaven’ adalah perspektif yang tepat untuk menggambarkan karakter kebangkitan China saat ini. China melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jika perspektif Barat berfokus pada negara-bangsa, China melihat dari sistem terbesar yang dikenal dengan tianxia, segala sesuatu yang berada di bawah langit.

Kedua, walaupun pelaksanaan BRI belum 100% terwujud saat ini karena penolakan dari beberapa negara dan usaha AS untuk mengekang China, penulis melihat bahwa proyek ini mungkin akan terwujud dalam 20 atau 50 tahun mendatang jika didukung dengan GDP yang progresif dan stabilitas China yang kuat. strategi *free and open Indo-Pacific* masih belum efektif dan harus lebih dipertajam lagi jika AS ingin membendung laju BRI. Bukan hanya karena slogan *America First* tetapi juga karena belum adanya arsitektur ekonomi Indo-Pasifik yang lebih komprehensif. Strategi ini lebih cenderung kepada pesan militer dari pada ekonomi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada definisi *the Brundtland Report* dimana memiliki pembangunan berkelanjutan memiliki nilai ekonomi juga mengandung nilai moral dan nilai ekologi. Dimana pada pembangunan dan implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bahwa adanya adanya interpretasi yang baik implementor terhadap kebijakan kawasan ekonomi

khusus, dalam penelitian ini lebih berfokus pada PT. Membangun Sulut Hebat sebagai elemen utama dalam membangun kawasan ekonomi khusus. Tetapi diperlukan peranan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta organisasi publik sangat di tentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai tersebut sehingga. Sejauh berjalan nya pembangunan kawasan ekonomi khusus Bitung hingga tahun 2019 pengelolaan keuangan banyak di lakukan oleh PT. Membangun Sulut Hebat namun perusahaan ini belum bisa menghasilkan profit bagi daerah.

Yang berjudul kebangkitan China melalui *Belt and Road Initiative* dan (Rekonstruksi hubungan dalam sistem Westphalia, yang ditulis oleh John Robert Verianto Korwa, Program studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada Hal ini tidak terlepas dari istilah *The Rise of China*" atau kebangkitan China khususnya dalam sektor ekonomi lewat mega proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Selain itu, pemerintah China menerapkan empat wilayah ekonomi khusus dekat pantai (Shenzhen, Zhuhai, dan Shantou di Provinsi Guangdong, dan Xiamen di Provinsi Fujian).¹⁴

Untuk mendukung reformasi, China mengintegrasikan diri dan menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat internasional dengan menjadi anggota *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia pada tahun 1980, dan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* di tahun 1986. sejalan dengan yang dikatakan oleh Hugh White yaitu, jika ekonomi China terus bertumbuh dalam 30 tahun ke depan seperti yang ia lakukan pada 30 tahun terakhir, maka

¹⁴ Robert John, Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Rekonstruksi hubungan dalam sistem Westphalia, Yogyakarta: Jurnal Nasional. Vol 8 No.1 (2019). Diakses melalui <https://Journal.umy.ac.ad/index.php.com>

China akan dengan mudah mengambil posisi AS untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia.¹⁵

John Mearsheimer mengatakan bahwa jika China terus meningkatkan GDP di masa mendatang dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar, sangat mungkin baginya untuk menggeser target pertumbuhan ekonominya ke pembiayaan belanja militer dan pada akhirnya dapat menentang supremasi militer Amerika Serikat. Berbagai kajian akademik mengenai kebangkitan China telah banyak dilakukan, seperti *The Rise of China and the Future of the West*, *The Rise of China in Chinese Eyes*, *The United States and the Rise of China: Implications for the Long Haul*.¹⁶

Kebangkitan Tiongkok dan relevansinya terhadap Indonesia. Tentunya sangat penting untuk melihat kebangkitan China saat ini dengan menggunakan perspektif yang berasal dari internal China sendiri (*tianxia*) dan kemudian mengkaitkan dengan isu kontemporer seperti BRI. Konsep ini penting untuk menggambarkan bagaimana China melihat dunia, terutama jika prediksi tentang China akan mengambil alih posisi AS sebagai negara adikuasa yang dominan pada masa mendatang adalah benar.¹⁷

Pada 7 September 2013, dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev, Presiden Xi mengusulkan agar China dan negara-negara Eurasia melakukan proyek bersama yang disebut dengan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (*The Silk Road Economic Belt*) dengan tujuan menciptakan koneksi darat dari Asia Tenggara

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

hingga China ke Eropa Barat. Proyek ini kemudian menjadi bagian dari konstitusi Partai Komunis China pada Kongres Nasional ke-19 di Beijing pada bulan Oktober 2017, yang menegaskan bahwa BRI akan tetap menjadi titik fokus bagi kebijakan luar negeri China dan jangkauan ekonomi Internasional, bahkan sampai di akhir masa jabatan kedua Presiden Xi pada 2022.¹⁸

Program *Belt and Road Initiative* sendiri bertujuan memperkuat hubungan kerjasama infrastruktur, perdagangan, dan investasi antara China dan sekitar 65 negara lain yang secara kolektif menyumbang lebih dari 30% PDB global, 62% populasi, dan 75% cadangan energi yang diketahui. Jalur Sutra merupakan istilah khusus yang menggambarkan rute perdagangan kuno antara Asia Tengah dan China, dan seiring berjalannya waktu menghubungkan China dan dunia barat. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemampuan sebuah negara untuk menangani proyek BRI dan kemungkinan untuk terjebak dalam hutang.¹⁹

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa BRI merupakan sebuah instrumen yang oleh Presiden Xi untuk menopang kebangkitan China di abad ke- 21 dan merekonstruksi dunia internasional di bawah perspektif tianxia. Dari kutipan di atas, jelas bahwa BRI bukan hanya sekedar inisiatif, tapi ibarat sebuah jendela bagi China untuk mengintegrasikan dirinya dengan ekonomi dunia, memperkuat pengaruhnya secara ekonomi, politik, dan budaya di wilayah yang dilalui program BRI, serta secara bersamaan mempromosikan kepentingan nasionalnya. Hal ini terlihat dalam berbagai forum dunia, termasuk KTT Asia-

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Afrika.²⁰

Pacific Economic Cooperation (APEC) 2018 di Papua Nugini, di mana Presiden Xi berhasil mempromosikan BRI kepada negara-negara Pasifik untuk bergabung, dan secara khusus berusaha meyakinkan AS sebagai pesaing terkuat.²¹

Skripsi yang berjudul Pengaruh Inisiatif OBOR (*One Belt One Road*) Tiongkok terhadap Perkembangan Infrastruktur Indonesia tahun 2017, yang ditulis oleh Rinandha Avifa Fahmi, Studi Hubungan Internasional, UIN. Penelitian berfokus pada kepentingan Indonesia – China.²²

Menjadi Kekuatan Ekonomi Dunia Selama inisiatif OBOR berlangsung, Tiongkok telah melakukan banyak kerja sama dengan negara partner untuk membangun beberapa infrastruktur publik, seperti Pelabuhan Gwadar dengan India, yang akan membuka rute perdagangan Tiongkok di wilayah Barat Daya Xinjiang, proyek pipa dengan Myanmar yang akan menjadi akses darat pertama terhadap minyak mentah Timur Tengah, serta Pelabuhan Piraeus dengan Yunani yang akan menjadi gerbang maritim di Eropa Tengah. Tetapi, masyarakat di beberapa provinsi masih mengalami kemiskinan, sebut saja, Gansu, Hainan, Ningxia, Qinghai dan Tibet yang menempati provinsi dengan PDB Perkapita terendah pada tahun 2016.²³

Untuk menghindari hal tersebut, maka Tiongkok mengajukan Inisiatif OBOR guna mengembangkan jaringan transportasi, investasi dan infrastruktur dalam

²⁰ Ibid.

²¹ Johny Robert Verianto Korwa, *Kebangkitan China Melalui Belt and Road Initiative dan (Red) konstruksi Hubungan Internasional dalam sistem Westphalia*. Jakarta: Jurnal Hubungan Internasional 2019. Hlm 8

²² Ibid.

²³ Ibid.

negeri yang sebagian besar akan pergi ke bagian Barat Tiongkok yang akan menjadi bagian dari *Belt*. Dengan begitu, istilah “*one stone, two birds*” menjadi nyata bagi Tiongkok. Kemudian, Negara ini membuat sebuah rencana pembangunan yang disebut dengan *China’s Western Development Program* pada tahun 1999. Program “*go west*” ini dilakukan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di 12 provinsi dan wilayah di bagian Barat Tiongkok, antara lain Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang, Inner Mongolia, Guangxi and Qinghai yang, berpenduduk sekitar 400 juta orang.²⁴

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi bagian dari Road atau jalur laut dalam inisiatif *Belt and Road Initiative* yang dicanangkan oleh Tiongkok. Angka tersebut setara dengan 12 % dari total investasi Tiongkok pada tahun yang sama. Walaupun begitu, jika dibandingkan Pakistan dan Malaysia, investasi yang diperoleh Indonesia masih relatif lebih kecil. Faktanya, infrastruktur Indonesia, terutama di daerah pinggiran dan perairan masih sangat tertinggal. Terdapat beberapa alasan utama yang menjadikan kucuran dana dari Tiongkok sedikit tersendat, salah satunya adalah regulasi dan birokrasi di Indonesia yang cukup membingungkan dan menyulitkan. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengungkapkan dalam acara Indonesia.²⁵

Infrastructure Finance Forum di Jakarta pada tahun 2017 lalu bahwa setidaknya terdapat 100 perundang-undangan tentang kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia yang tidak konsisten satu sama lain dan kurang

²⁴ Ibid. hlm 5-6

²⁵ Ibid.

menguntungkan bagi investor asing Selain itu, masalah kemacetan dan buruknya infrastruktur yang menyebabkan mahalnya biaya distribusi juga menjadi hambatan. Terlepas dari kucuran dana yang diberikan Tiongkok pada negara-negara lain, Investasi Tiongkok di Indonesia tetap memberikan keuntungan yang sangat besar. Gagasan tersebut disampaikan oleh Joko Widodo dalam KTT Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014.²⁶

Gagasan ini semakin didukung dengan disahkannya *National Ocean Policy* melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Sebagai bagian dari proyek, Indonesia telah menandatangani Nota kesepakatan antara komisi reformasi republik rakyat Tiongkok dan kedua belah pihak sepakat untuk mempererat kerja sama dalam bidang infrastruktur dan industri, seperti mengembangkan Zona Khusus Ekonomi Bitung, menyepakati Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung, serta melakukan kerja sama pada sewa dan operasi pembangkit listrik tenaga batubara.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah menjelaskan kebangkitan Tiongkok dari awal mulanya sejarah pelayaran perdagangan China yang telah menjelajahi dunia, hingga pada keterbukan ekonomi Tiongkok yang bermula pada kebijakan ekonomi yang mendatangkan banyak investor dari berbagai luar negeri dengan membuat kawasan ekonomi khusus yang diperuntungkan untuk meningkatkan pendapatan domestik dalam mensejahterakan rakyat. Maka dengan itu keberhasilan ekonomi keterbukan Tiongkok terbukti ketika negara ini mampu

²⁶ Ibid.

²⁷ Rinandha Avifa Fahmi, Pengaruh Inisiatif OBOR (One Belt One Road) Tiongkok terhadap Perkembangan Infrastruktur Indonesia tahun 2017. Jakarta : UIN 2018. Hlm . Diakses melalui <https://respository.uinjkt.ac.id.com> (pada 25/11/2021 02:13 WIB).

menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dikawasan Asia yang hampir melampaui Amerika Serikat dan Rusia.

Kepentingan Indonesia Terhadap *One Belt One Road* Dalam Upaya Mewujudkan Poros Maritim Dunia ditulis oleh, Kris Naning Suryaningsih. Penelitian berfokus pada Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan kerja sama dengan Tiongkok. Secara sederhana, penjelasan terhadap definisi dari letak geografis merupakan posisi suatu wilayah seperti negara berdasarkan pada kenyataan yang ada di permukaan bumi dengan fenomena faktor geografis yang membatasi seperti berada diantara pegunungan, gunung, sungai, lautan, benua maupun samudra Indonesia sendiri merupakan negara yang berada di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara yang memiliki bentuk negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17,504 pulau berdasarkan rekapitulasi data pulau tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Wilayah kepulauan.²⁸

Indonesia berada digaris khatulistiwa dengan iklim tropis yang dikenal dengan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah Pada sisi kelautan, Indonesia memiliki luas wilayah perairan sebesar 5,8 juta kilometer persegi dari seluruh wilayah teritorial Indonesia yaitu 7,7 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yg mencapai luas 2,7 juta kilometer persegi. Orientasi terhadap poros maritim telah muncul sejak zaman penjajahan di Indonesia terutama dengan masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC yang berusaha untuk mengeksploitasi kekayaan laut di Indonesia dengan menggunakan armada dagang yang dimiliki.²⁹

²⁸ Ibid. hlm 10

²⁹ Ibid hlm 10-15

Pada tahun 1957 lahir sebuah konsep Nusantara yang mendeklarasikan bahwa perairan yang menghubungkan pulau yang masuk pada daratan Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari perairan nasional yang mutlak menjadi kedaulatan Indonesia. Konvensi hukum laut UNCLOS telah menghasilkan beberapa zona pengaturan mengenai hukum yang ada di laut antara lain, perairan dalam, perairan kepulauan untuk pelayaran internasional, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut lepas serta kawasan laut internasional.

Dengan besarnya wilayah serta banyaknya penduduk di Indonesia, serta letak geografis yang merupakan negara maritim, Indonesia mampu menciptakan suatu stabilitas keamanan maritim tidak hanya di wilayah regional tetapi juga Asia – Pasifik Indonesia memiliki jalur laut yang dapat digunakan sebagai rute yang bisa dilalui oleh pelayaran dan penerbangan yang ditetapkan dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia . Selain itu, menurut Hasjim Djalal sebagai pakar hukum laut, ketika Indonesia ingin menjadi sebuah poros maritim maka Indonesia harus memiliki kesiapan dalam mengelola dan menjaga unsur kelautan untuk kemajuan bangsa serta menciptakan keamanan di wilayah perairan Indonesia.³⁰

Sehingga Indonesia sangat bergantung pada laut karena maritim di Indonesia memiliki fungsi vital sebagai integrasi teritorial wilayah yang bersifat nasional, sarana transportasi laut, deposit sumber daya alam, dan pertahanan keamanan negara. *Belt and Road* merupakan sebuah refleksi terhadap kekayaan jalur sutra di Tiongkok pada masa dinasti Han sekitar abad 200 sebelum Masehi yang telah menghubungkan Tiongkok dengan negara di Benua Asia, Afrika, dan Eropa.

³⁰ Ibid. hlm 15-20

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *One belt and Road* dibentuk melalui dua jalur yaitu jalur darat sebagai inisiatif utama yang dikenal sebagai New Silk Road serta jalur maritim yang disebut sebagai *The 21st Century Maritime Road* atau Jalur Maritim Abad 21.

Pada jalur ini, negara-negara yang berada di wilayah pesisir atau memiliki laut dan berbatasan dengan Tiongkok, akan dilalui oleh rute OBOR tersebut. Apabila mengingat bahwa kebijakan Poros Maritim Dunia dengan OBOR, kedua kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep kebijakan luar negeri yang memiliki jangka waktu panjang dalam implementasinya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Indonesia dengan Tiongkok saling memiliki kepentingan yang mendapatkan titik temu pada kebijakan OBOR dan gagasan Poros Maritim Dunia.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dimana bahwa kawasan Indonesia pada khususnya memang kawasan perairan yang sangat melimpah potensi sumber daya kelautan dan perairan dimana hal tersebut lebih menekankan Indonesia sebagai negeri yang telah diwarisi keanekaragaman hayati lautnya adalah potensi yang sangat luar biasa yang harus dimanfaatkan dengan membangun ekonomi basis maritim dalam upaya meningkatkan pelabuhan dan tol sebagai arus transportasi jasa ekspor dan impor, maka dengan itu Indonesia memanfaatkan kerja sama bilateral dengan Tiongkok sebagai upaya untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia dan Tiongkok ingin membangun titik strategis untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan internasionalnya.

³¹ Kris Naning Suryaningsih. Kepentingan Indonesia Terhadap One Belt One Road (OBOR) Dalam Upaya Mewujudkan Poros Maritim Dunia, (Jakarta : Jurnal Nasional 2019). Hlm 1-2. Diakses melalui <https://journal.unpas.ac.id.com> (pada 25 /11/2021 01: 45).

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Neoliberalisme

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori *Neo Liberalisme*. Untuk menganalisis kasus pembangunan nasional Indonesia dan mega proyek *Belt and Road Initiative* sebagaimana mestinya teori digunakan untuk melakukan berbagai pembuktian dan relevansi antara studi kasus dan teori alasan penulis memilih teori ini untuk penelitian yang berjudul kerjasama bilateral Tiongkok- Indonesia pada pembangunan kawasan zona ekonomi khusus Bitung di Sulawesi Utara pada tahun 2019-2021 karena salah satu mega proyek jalur ekonomi internasional yang dibiayai oleh Tiongkok di bangun di kawasan Indonesia timur, mengingat bahwa dalam teori neoliberalisme penulis lebih menekankan pada perdagangan bebas karena tujuan dari Tiongkok membuka kembali jalur sabuk ekonomi ini untuk melancarkan arus perdagangan ekspor dan impor Tiongkok ke negara-negara luar kawasan Asia.

Studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki banyak aliran yang berbeda seperti *Realisme*, *Globalisasi*, *Liberalisme*, dan *Liberalisme institusional*, khususnya dalam mengenai interaksi antar negara-negara secara global. Berbeda dengan Neo Realisme yang menyatakan bahwa satu-satunya aktor penting dalam dunia Internasional yang mana memungkinkan sebuah organisasi hubungan Internasional non pemerintah memiliki pengaruh sistematis terhadap pola-pola dalam hubungan Internasional, sedangkan Neoliberalisme memiliki pandangan yang berbeda.³²

³² F.Kuyuma. *The end of History and the last Man* (London : 1992). hlm 48

Perkembangan mengenai paham Neoliberalisme ini pertama kali dipopulerkan oleh Friedrich August Von Hayek, seorang ekonomi Austria yang melakukan pertemuan dengan beberapa pakar ekonom dari Amerika dan Eropa dalam konferensi yang berlangsung di Mont Pelerin, Swiss pada tahun 1947. Pemahaman tentang Neoliberalisme menganggap bahwa manusia adalah pertama-tama dan paling utama, yang disebut dengan *homo economicus* (manusia ekonomi). Jadi yang menentukan kemajuan dan perkembangan ekonomi harus diserahkan sepenuhnya pada manusia.³³

Neoliberalisme pada masa era *Globalisasi*, kemenangan politik kanan (*New Right*). di Inggris dan Amerika Serikat khususnya pada tahun 1970- an tercapainya Keynesianisme, yang disebut sebagai hubungan logis mengenai filsafat intervensi negara dalam kehidupan ekonomi. Menurut pemikir Keynesianisme beranggapan bahwa negara ikut andil dalam ekonomi untuk melancarkan bisnis, memberikan keamanan dan kesejahteraan sosial dan penyerapan tenaga kerja. Dimana kaum *Neoliberalisme* menyukai permainan bebas “kekuatan pasar” dan peran negara dalam meminimalkan urusan ekonomi.

Menurut kaum *Neoliberalisme* dimana perdagangan bebas yang pertama kali dikemukakan oleh Smith dan Ricardo, masih berlaku sampai sekarang. Para pedagang komersial dibiarkan untuk menukarkan uang dan barang tanpa diganggu oleh negara. Harus diterapkan batasan mengenai hukum perdagangan Internasional dan bukan perlindungan semata-mata adanya subsidi yang

³³ Ibid.

menghambat kebebasan lajunya nilai tukar. Hanya dengan perdagangan bebaslah mampu membangkitkan daya saing akan penggunaan paling efisien sumber daya alam dan sumber daya manusia dan modal.³⁴

Landasan pertama dalam perdagangan bebas keuntungan komparatif *Theory of Comparative advantage* di mana negara dan kemandirian ekonomi agar secara khusus memproduksi barang dan jasa yang lebih murah sebagai sebuah dukungan sebuah negara dalam kerja sama Internasional. Mereka akan bisa menukar barang ditempat lain dengan biaya produksi yang lebih murah. ide negara berdaulat yang melakukan perdagangan Internasional karena adanya kesamaan satu sama lain dibidang ekonom yang membuat anakronisme. Perdagangan industri mendominasi sektor industri ekonomi dunia.³⁵

Ekonomi Globalisasi membuat penyebaran industri infrastruktur ke beberapa negara berkembang dan relokasi pusat manufaktur transnasional ke daerah dengan biaya upah yang lebih murah tapi tinggi tingkat penindas. Pentingnya diketahui dengan tidak terlibatnya negara dalam dimensi ekonomi maka, maka komunitas investasi asing telah terbebas dari rintangan dan kontrol negara, dan mampu memilih lokasi paling menguntungkan bagi modalnya. Dan lebih buruknya di mana negara tuan rumah memberikan subsidi dan perlindungan kepada investor karena desakan pasar.³⁶

Teori *Neoliberalisme* beranggapan bahwa pentingnya peran aktor non-negara dalam hubungan perdagangan Internasional sedang sedikitnya peran

³⁴ Scutt Burchill dan Andrew, *Theory of International Relations* (New York : St. Martins Pres,INC 1996) hlm 73-75

³⁵ Ibid. Hlm 76-77

³⁶ Ibid. Hlm 82-83

negara dalam menjaga keseimbangan pasar. Dimana negara sebagai landasan hukum dalam menciptakan keamanan bagi pelaku bisnis dalam melindungi properti pribadi dan menjaga ketertiban dalam melindungi pasar. *Neoliberalisme* tidak berupaya menghilangkan peran negara dalam perekonomian Internasional tetapi berperan sesuai dengan sistem perekonomian yang ada.³⁷

Adanya landasan dalam perdagangan bebas bahwa akan membangkitkan persaingan, seterusnya dapat meningkatkan dan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan modal. Dengan ini maka suatu negara membutuhkan kerjasama dan institusi internasional dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan perdagangan bebas suatu negara. Maka dengan itu ada sifat ketergantungan dari hubungan kerjasama tersebut yang dilakukan oleh suatu negara dengan atau non-negara lainnya.³⁸

Jika mengutip dari Keohane dan Nye (1977) dimana ia menjelaskan bahwa institusi Internasional dan situasi ekonomi Internasional yang saling tergantung (*complex Interdependence*) adalah dimana adanya situasi politik global yang menyebabkan aktor negara maupun bukan aktor negara, saling tergantung satu sama lain. Dimana adanya saling tergantung yang merujuk pada situasi adanya efek timbal balik antar negara atau aktor non- negara di negara yang berbeda. Dalam situasi seperti ini maka adanya hubungan dan kebijakan yang membuat saling tergantung bersifat kooperatif dan kompetitif.³⁹

Maka dengan itu terjalinlah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan

³⁷ Johanna Bockman, *Neoliberalism* (The American Sociologi Association : Contexts summer 2013)

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

dalam upaya mencapai kepentingan bersama. Terdapat tiga karakteristik yang menjadi pembahasan utama dari saling ketergantungan atau *complex interdependence*. Yang pertama dalam hubungan Internasional terdapat banyak interaksi yang menghubungkan masyarakat dan semua negara termasuk pemerintah dan transaksi-transaksi lintas negara. Maka dengan itu institusi Internasional memiliki peranan yang sangat penting untuk melanggengkan ekonomi suatu kawasan atau negara.⁴⁰

Dalam Teori *Neoliberalisme* juga mengatakan bahwa *free market and free trade* dalam fundamentalnya free market dapat diistilahkan bahwa adanya ukuran yang diperlukan dan berguna untuk penciptaan kesejahteraan dan memperbaiki populasi dan secara luas. Dan adanya asumsi terjaminnya kebebasan individu yang dijamin dengan kebebasan pasar dan perdagangan merupakan bentuk utama dari pemikiran kaum *neoliberalisme* kebebasan individu tercermin dalam kepentingan pemilik properti, bisnis dan perusahaan multinasional serta finansial modal.⁴¹

Neoliberalisme menjelaskan mengenai pentingnya interaksi Internasional dalam melakukan kerja sama ekonomi antar Indonesia - Tiongkok. Pada dasarnya *Belt and Road Initiative* adalah alat geopolitik untuk mendapatkan perhatian dunia dan global. secara geoekonomi kawasan Tiongkok membangun BRI dan instrumen AIIB sebagai salah satu hegemoni politiknya dalam membangun pengaruh dan kontrol dikawasan Asia sedangkan dalam bidang

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism, Oxford University press. New York, 2007.

ekonomi melakukan kerja sama ini sebagai bentuk kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan pendapatan serta membangun jalur ekonomi maritim Tiongkok. Sedangkan keuntungan yang diinginkan oleh Indonesia meningkatkan ekonomi maritim dan jaringan perdagangan Internasional melalui infrastruktur dengan investasi dari Tiongkok dan juga menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia.⁴²

Dalam penelitian ini teori neoliberalisme digunakan untuk menganalisis dinamika geopolitik *Belt and Road Initiative* dimana adanya upaya China untuk mengintegrasikan diri sebagai status quo yang ada dengan menambahkan jumlah kerjasama ekonomi dengan negara tetangga. Tindakan ini dan ambisi militer sering kali merusak ekspansi ekonomi seperti konflik laut China selatan, namun dengan strategi China melebur ke pasar regional dan menjadi penyedia investasi sekaligus pertukaran teknologi adalah sebuah pendekatan baru bagi China untuk memelihara stabilitas regional dan hidup bersama sehingga tercapai ekonomi yang menguntungkan.

Dimana neoliberalisme menekankan pada asumsi kerjasama ekonomi yang saling berketergantungan dan adanya peran intitusi, sementara itu fungsi kerjasama dapat menghindarkan konflik terbuka maupun konflik tertutup. Dimana dengan adanya ketergantungan ini Tiongkok sangat membutuhkan jalur perdagangan internasional perairan Indonesia yang dilewati oleh sabuk *Silk Economic road dan Maritime Silk Road*. Maka dengan mega proyek ini Indonesia sangat butuh pembangunan nasional, yang mana Indonesia secara

⁴² Ibid.

pendapatan nasional belum bisa memenuhi semua kebutuhan pembangunan maka jalan pintas yang dilakukan oleh Indonesia adalah menerima tawaran investasi yang di tawarkan oleh Tiongkok.

Neoliberalisme melihat hubungan Tiongkok dan Indonesia masing-masing memiliki kebutuhan yang sangat kompleks apalagi jika sepanjang tahun 2019 hingga 2022 ada peningkatan nilai ekspor barang mentah dari kepulauan Bitung melalui pelabuhan hub-internasional Tiongkok adalah negara dengan nilai tujuan pasar Sulawesi Utara terbesar untuk produk-produk non-migas setiap tahun nya mengalami peningkatan. Dan sebaliknya propinsi Sulawesi Utara dengan pelabuhan peti kemas Bitung telah beropersai dalam aktivitas ekspor dan impor bagi seluruh jenis barang.

Yang mana sebelumnya aktivitas ekspor dan impor untuk komoditas perkebunan dan perikanan asal Sulawesi Utara harus di ekspor melalui Tanjung Periok Jakarta atau Tanjung Perak. Tapi dengan beroperasinya pelabuhan internasional Bitung maka semua aktivitas ekspor dan impor bisa dilakukan secara langsung. Maka dengan adanya kerjasama infrastukture ini Tiongkok dan Indonesia akan menjadi patner utama dalam investasi dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan satu sama lain.

2.2.2 Diplomasi Ekonomi

Dalam studi ilmu Hubungan Internasional seperti kebijakan luar negeri dan Diplomasi (termasuk didalamnya Diplomasi ekonomi dan Diplomasi komersial yang akan digunakan, diplomasi adalah komunikasi yang akan digunakan suatu negara dengan pihak luar negara). Alasan penulis untuk memilih teori diplomasi

ekonomi dalam penelitian ini sebagai rujukan dimana bahwa kedua negara ini pada dasarnya telah menjalin kerjasama bilateral yang sangat lama di berbagai bidang tanpa kecuali bidang ekonomi, upaya Tiongkok dalam menjalin relasi dengan negara-negara kawasan Asia tenggara semakin berkembang.

Jika merujuk pada teori Diplomasi ekonomi menurut Bayne dan Woolcock, Diplomasi Ekonomi merupakan serangkaian kegiatan, mengenai metode dan proses untuk pengambilan keputusan internasional yang terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas (seperti ekspor, impor, investasi, peminjaman, pemberian bantuan, migrasi dll) yang dilakukan oleh aktor negara dan non -negara seperti NGO, MNC dll, yg terjadi di dunia nyata : ada tiga elemen penting dalam diplomasi ekonomi yang harus di ketahui yang pertama elemen Penggunaan pengaruh menggunakan pengaruh politik dan hubungan untuk mempromosikan atau mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional, untuk memperbaiki fungsi pasar juga untuk mengatasi kegagalan pasar dan untuk mengurangi biaya dan risiko transaksi lintas batas (termasuk hak milik).

Yang kedua Elemen penggunaan aset dan hubungan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan biaya konflik dan untuk memperkuat manfaat bersama dari kerja sama dan hubungan politik yang stabil, yaitu untuk meningkatkan keamanan ekonomi. Sub -bidang ini keduanya berisi kebijakan struktural dan perjanjian perdagangan serta investasi bilateral (yang ditujukan untuk mencapai pola perdagangan geografis tertentu) dan distorsi politik perdagangan serta investasi seperti dalam kasus boikot dan embargo. Yang ketiga elemen sinergitas Sebagai cara untuk mengkonsolidasikan iklim politik yang tepat dan lingkungan

ekonomi politik internasional untuk memfasilitasi dan melembagakan tujuan tujuan ini. Sub-bidang ini meliputi negosiasi multilateral dan merupakan domain organisasi dan institusi supranasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Uni Eropa (UE) dll.

Dan negara-negara Asia tenggara masuk kedalam mega proyek *besar Belt and Road Initiative* (BRI) diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok ternyata tidak mudah mengingat masih banyak masalah keamanan kawasan yang melibatkan Tiongkok seperti masalah laut China selatan yang bersengketa dengan Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, yang jika diperhatikan juga merupakan negara kunci dalam proyek BRI di masa mkini, belum lagi narasi narasi publik yang berkembang menjuluki diplomasi ekonomi Tiongkok ini sebagai “*Debt Trap Diplomacy*”.

Maka penggunaan *Economic diplomacy* dengan menjalin kerja sama dalam kerangka BRI menjadi salah satu strategi Tiongkok. Dengan tiga elemen penting dari Economic diplomacy, yakni penggunaan pengaruh, penggunaan asset, dan melakukan sinergitas yang menghasilkan output sebuah win-win cooperation atau menghasilkan kontribusi positif terhadap kedua belah pihak (Tiongkok selaku inisiator, dan negara lain sebagai anggotanya).

Diplomasi digunakan di berbagai bidang misalnya pertahanan keamanan dan politik, ekonomi diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aktor untuk menjalin kerja sama antar kedua negara untuk memperoleh hasil-hasil ekonomi yang akan menguntungkan kedua pihak hal ini biasanya dalam bidang pemberdayaan perdagangan dan investasi.

Diplomasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai berikut *Economic diplomacy is the process through which countries tackle the outside world, to maximize their national gain in all the fields of activity, including trade investment and other forms of economically beneficial exchanges, where they enjoy comparative advantage; it has bilateral, regional and multinational dimension, each of which is important.* (referencekishan) maka dengan itu dapat dikatakan bahwa unsur perdagangan internasional dan investor sangat penting dan menjadi perhatian penting dalam transaksi internasional.⁴³

Diplomasi ekonomi pada dasarnya sama dengan diplomasi pada umumnya yang menjalankan strategi dan praktek yang sama. Ada beberapa hal yang membedakan diplomasi ekonomi dengan yang diplomasi pada umumnya, dimana karakter dari diplomasi ekonomi ini harus dijalankan dengan sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar. Dimana ada beberapa kasus kegagalan dalam menjalankan diplomasi ekonomi jika adanya tawaran alternatif yang lebih menarik. Atau dengan pengertian lain bahwa dalam prakteknya diplomasi ekonomi berhadapan langsung dengan kekuatan pasar, serta harus adanya peranan yang lebih besar dari sektor privat dalam prosesnya.⁴⁴

Rashid berpendapat bahwa mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai proses dari formulasi dan negosiasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja dan investasi di negara lain. Dalam kata lain diplomasi ekonomi juga secara luasnya memasukan beberapa elemen yaitu dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan nilai tukar uang

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

dan informasi termasuk di dalamnya bantuan luar negeri. Jika disimpulkan bahwa diplomasi ekonomi adalah elemen penting suatu negara untuk mendapatkan relasi ekonomi.⁴⁵

Pada umumnya untuk praktek diplomasi ekonomi di Indonesia masih terbatas. Jika melihat laporan Indonesia hanya memberikan satu indikator bagi keberhasilan diplomasi ekonomi yakni harus adanya peningkatan dalam kapasitas volume perdagangan Indonesia namun indikator ini tidak cukup untuk menyimpulkan kesuksesan di jalankan nya praktek diplomasi ekonomi itu sendiri. Jika melihat pada aktivitasnya diplomasi ekonomi Indonesia masih terlihat *extra tradisional management, policy management, role of non-state dan actor economic aid.*⁴⁶

Dalam hal ini diplomasi ekonomi menyertakan berbagai *instrumen* seperti negara dan lainnya yang meliputi kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, bank sentral, bea cukai dan tentu kementerian luar negeri, namun dalam masa ini perkembangan diplomasi ekonomi sudah melibatkan masyarakat sipil juga akan memasukan asosiasi bisnis. Dalam beberapa kesempatan melalui presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa kebijakan luar negeri adalah meningkatkan ekonomi Indonesia, diplomasi ekonomi Indonesia berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri, perdagangan Internasional dan investasi.⁴⁷

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Rana, K.S. Economic Diplomacy :experiment of Developing Countries dalam Bayne, N. Dan S. Woolcock (eds) The new Economic Diplomacy : Decision –making and negotiations in international economic relations. Ashgate Publishing company. 2007.

⁴⁷ Ibid.

Pada masa orde baru fokus utama diplomasi ekonomi Indonesia lebih banyak berkaitan dengan masalah mendapatkan bantuan luar negeri dari negara-negara donor dan Lembaga keuangan pembangunan Internasional. Urgensi dari diplomasi ekonomi Indonesia adalah saat fokus kebijakan diplomasi ekonomi rencana Joko widodo untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mandiri dengan memanfaatkan perdagangan dan investasi asing di Indonesia.⁴⁸

Pada masa pemerintahan Joko Widodo melalui visi dan misi yang menjadi prioritas diplomasi ekonomi Indonesia untuk benar-benar memahami kebutuhan negara dengan memperkuat kebijakan luar negeri dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. melalui duta besar RI beliau menitikberatkan pada diplomasi perdagangan ketimbang diplomasi politik. Dimana para diplomat Indonesia dituntut untuk proaktif dalam memasarkan produk Indonesia.

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi maka suatu negara harus memiliki hubungan baik dengan negara lain dan perusahaan asing untuk melakukan kerjasama dimana akan saling menguntungkan. Dalam perdagangan Internasional dibutuhkan strategi untuk menentukan alokasi sumber daya ekonomi yang lebih efisien agar mendapatkan keuntungan tertinggi. Dalam buku yang berjudul *The new Economic Relations ; Decision making and negotiation in International Economic Relations*, Stepehn Woolock mengatakan ada beberapa faktor penentu kinerja diplomasi ekonomi baik melalui perdagangan

⁴⁸ Ibid.

maupun investasi.⁴⁹

Faktor utama adalah *relative economic power*, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga internasional dalam melakukan perjanjian perdagangan multilateral atau global seperti *World Trade Organization* adalah lembaga internasional yang memiliki kekuatan ekonomi negara anggotanya yang berbeda dan bergerak di berbagai sektor dan terbagi menjadi beberapa keanggotaan negara-negara industri maju, *emerging markets*, dan negara-negara berkembang lainnya. maka akan memberikan kekuatan yang berbeda-beda, sehingga untuk memenangkan suatu kepentingan diperlukan perundingan dengan kelompok yang memiliki kepentingan bersama. yang memiliki berbagai sektor kerjasama dimulai dari negara-negara industri maju, *emerging markets* dan negara-negara berkembang lainnya.⁵⁰

Jika berdasarkan pada *relative economic power* dibutuhkan kejelasan dan harus memahami dengan jelas kepentingan nasional negara sendiri. Dimana dibutuhkan sikap yang bijak untuk melakukan negosiasi dalam forum multilateral. Selain itu perlu diketahui juga kepentingan nasional harus jelas dan akurat dalam menentukan aktor dan negara seperti apa yang harus dijadikan mitra dagang dan kerjasama. Pada level regional Asia tenggara misalnya harus berdasarkan *relative economic power* dimana negara-negara di anggota memiliki peluang dalam menjalin kerjasama dengan negara diluar kawasan.⁵¹

⁴⁹ Lairson and Skidmore. *International Political Economy: The Struggle of power and wealth*. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher. 1997. Hlm 14

⁵⁰ Stephan Woolcock. *Factor shaping economic Diplomasi ; An Analytical Toolkit* dan baca juga Bayne and Stephen Woolcock (eds) *Diplomacy : Decision making and negotiation in international Economic relations*. Burlington : Astage Publishing Company. 2011. Hlm 18-25

⁵¹ Ibid.

Faktor yang kedua membentuk diplomasi ekonomi dengan *international institutions or regimes* (lembaga pengaturan Internasional) mengutip kembali dari Stephen Krasner dimana yang dimaksud dengan *International institutions or regimes* adalah *principle, norms, and decision making procedure around which actor expectations converge in a given issue area*. Dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa bagaimana para ahli ilmu hubungan internasional menjelaskan bahwa mengapa kerjasama internasional terjadi dalam perdagangan dan investasi.⁵²

Interdependensi ekonomi yang meningkat dan yang terjadi sesudah perang dunia kedua adanya dorongan negara-negara didunia untuk melakukan perluasan kerjasama Internasional guna untuk mencapai kepentingan nasional. Adanya kepentingan bersama dalam menjalin kerjasama tidaklah cukup dalam implementasinya. Misalnya menurut kaum neo-liberal mengatakan bahwa dalam kondisi hubungan internasional yang anarki saja tidak memiliki otoritas sentral pada kepentingan bersama tidak cukup untuk menjalankan hubungan kerjasama internasional.

Dalam *internasional regimes* seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka kerangka kerjasama perdagangan dan investasi multilateral, regional dan bilateral sangat dibutuhkan dalam diplomasi ekonomi. Faktor yang ketiga kondisi pasar dan market, pentingnya suatu negara mengetahui keuangan global sangat mempengaruhi fiskal dan moneter dalam suatu negara. Dimana suatu negara harus mengetahui dampak dari beberapa perubahan dan gejolak

⁵² Ibid.

keuangan sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara serta diperlukan kredibilitas di mata para investor.⁵³

Faktor keempat yang mempengaruhi diplomasi ekonomi adalah yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi adalah adanya persaingan kepentingan yang tercipta dalam negeri sendiri. Dalam hal ini maka pemerintah harus mengakomodasi semua kepentingan dan lembaga yang terkait baik birokrasi pemerintah bersama-sama dan bersinergi untuk kepentingan nasional. Dan hal ini sering terjadi akibat dari selisih kepentingan nasional bisa mengganggu dan merugikan misi diplomasi ekonomi. Dan hal lain yang adalah ketika pemerintah tidak memiliki blueprint ekonomi untuk mengantisipasi arus liberalisasi perdagangan di tingkat regional dan global.⁵⁴

Faktor yang kelima adalah dari substansi dan implementasi diplomasi ekonomi adalah ide-ide yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan diplomasi ekonomi misalnya, menteri perdagangan yang pro-liberalisasi akan mendorong terjadinya perjanjian bebas sedangkan pejabat pemerintah yang lain menginginkan pro-industri dalam negeri dan akan lebih berhati-hati dalam menyikapi arus liberalisasi dan membatasi perdagangan dan investasi. Diplomasi ekonomi tidak pernah berlangsung dalam ruang kosong tetapi senantiasa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, sosial budaya domestik yang dengan berlangsungnya perkembangan ekonomi regional dan global.⁵⁵

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Aleksius Jemandu. Kinerja Diplomasi ekonomi : Evaluasi ata perjanjian perdagangan dan investasi. Jakarta pusat : Badan pengkajian dan pengembangan kebijakan kementerian luar negeri

Pada masa kini Diplomasi menjadi instrumen yang penting bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan. Diplomasi berkembang secara luas seiring dengan berkembangnya berbagai aktor kerjasama. Dalam bidang ekonomi misalnya Indonesia telah lama melakukan diplomasi sebagai instrumen politik luar negerinya khusus dengan Tiongkok. Beberapa kebijakan ekonomi Indonesia yang menarik perhatian perusahaan Tiongkok di bidang konstruksi serta menerima kesepakatan dengan Tiongkok akan mempromosikan kawasan ekonomi khusus Indonesia dan kawasan Industri di kawasan Asia melalui platform perusahaan.

Diplomasi digunakan dalam penelitian ini ialah karena investasi dan perdagangan sebagai fokus utama diplomasi ekonomi Indonesia dimana bahwa isu mengenai ekonomi menjadi salah satu prioritas utama hubungan luar negeri dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menjadi sorotan utama publik internasional. dimana ada dua hal penting yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu investasi dan perdagangan dua hal ini adalah fokus utama dari kebijakan luar negeri terkait hal ini juga bahwa perlunya peningkatan investasi di bidang infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadai maka mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara jangka panjang.

Maka dengan itu fokus untuk investasi ialah dengan ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dimana bidang inilah yang akan menghasilkan ekonomi yang lebih besar karena tidak bisa berharap banyak ekonomi akan maju

jika tidak di dukung dengan infrastructure yang baik. Sama halnya pembangunan infastruktire tol laut dan pelabuhan internasional yang dibangun dikawasan Indonesia timur khususnya propinsi Sulawesi Utara dimana dengan adanya pembangunan infrastructure maka proses ekspor dan impor akan berjalan dengan lancar. Adapun dari segi perdangan dimana terus melakukan hubungan kerja sama luar negeri, baik bilateral, regional maupun multiteral seperti kerja sama Tiongkok Indonesia dalam mega proyek jalur sutra perdagangan internasional.

Diplomasi ekonomi Indonesia yang terdiri atas 4 pilar utama memiliki 3 fokus utama, yaitu Trade, Tourism, and Invesment (TTI) yang mana fokus tersebut diharap mendapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. TTI pada dasarnya merupakan bidang yang terangkum dalam Rancangan Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Secara umum, kerja sama ekonomi Indonesia meliputi kegiatan perdagangan yang mana salah satunya adalah kegiatan ekspor-impor.

Produk asing yang diserbu dari berbagai negara terutama dari Tiongkok dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi. Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpengkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja akan berkurang. Diantara Indonesia-Tiongkok terdapat sistem perdagangan

yang dinamai sistem Bebas Hambatan. Sistem perdagangan tersebut membuat terhapusnya tarif dan bea masuk dalam kegiatan ekspor-impor Indonesia-Tiongkok.

Maka dengan itu Diplomasi dapat kita artikan sebagai suatu implementasi kepandaian dan strategi pada aktivitas kerja sama antar negara yang berdaulat. Percepatan dan efktivitas pembangunan ekonomi Indonesia menjadi salah satu dari aktivitas perdagangan yang fokusnya adalah ekspor-impor. Seperti halnya dengan adanya fasilitas pembangunan kawasan ekonomi khusus propinsi Sulawesi Utara maka dengan itu barang-barang non-migas sektor industry manufaktur akan dapat diekspor ke pasar internasional. Untuk akses ke pasar non-tradisional sangat tergantung kepada mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India.

Maka dengan adanya kerja sama bilateral Indonesia Tiongkok ini maka dengan mudah ekspor industry kecil menengah untuk menembus kepasar global, karena akses untuk segala aktivitas ekspor dan impor sudah mudah dijangkau oleh pelaku usaha dan bisnis daerah Sulawesi Utara yang mana hal ini akan berdampak besar terhadap pendapatan daerah melalui kegiatan ekspor dan impor produk-produk daerah ke luar negeri, Indonesia juga sudah memiliki perjanjian dagang bebas China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) dengan China. Maka ini adalah peluang besar yang harus di manfaatkan masyarakat setempat maupun kawasan Indonesia Timur untuk meningkatkan kualitas produksi barang untuk bisa menembus pasar global karena sudah ada akses yang lebih mudah.

2.2.3 Theory Foreign Direct Investment (FDI)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rujukan FDI sebagai bahan untuk menganalisis kerjasama bilateral Tiongkok dan Indonesia pada pembangunan kawasan zona ekonomi khusus dimana Tiongkok adalah satu negara yang memiliki peranan yang sangat penting karena Tiongkok adalah negara utama yang melakukan investasi langsung terhadap pembangunan nasional tol laut dan pelabuhan internasional dikawasan Indonesia Timur melalui instrument AIIB sebagai penyalur dana dalam berbagai mega proyek pembangunan yang telah di sepakati kedua negara ini, penulis menemukan data serta informasi dari berbagai sumber bahwa Tiongkok saat ini adalah negara dengan nilai investasi langsung terbesar di Indonesia dalam menanamkan modalnya di berbagai bidang kerjasama tanpa kecuali ekonomi maritim.

Tercatat dari berbagai data dan informasi yang di himpun bahwa Indonesia di kawasan Asia yang memiliki nilai pinjaman terbesar nomor dua setelah India dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional republik Indonesia dalam rangka menuju Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Bukan tanpa alasan memang Indonesia memilih Tiongkok sebagai investor utama dalam bidang infastruktur tol dan pelabuhan internasional, selain kerjasama bilateral ini sudah terjalin lama dan Tiongkok juga adalah patner dagang terbesar Indonesia setelah Singapura dalam berbagai aktivitas ekspor dan impor.

Dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang hukum ekonomi dan hukum bisnis mengatakan terminologi investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung oleh *investor lokal* atau

domestic investor yang disebut sebagai penanaman modal dalam negeri, sedangkan investor asing *Foreign direct investment* yang disebut sebagai penanaman modal asing.⁵⁶ Mengenai Investasi Jurgen Basedow juga mengemukakan pendapat yang dikutip oleh An An Chandrawulan menurut hukum ekonomi nasional dan internasional yang mengatur penanaman modal asing sangat dinamis dan dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan penanaman modal asing dengan strategi penggabungan perusahaan global.⁵⁷

Dalam masalah penanaman modal asing Indonesia telah mengaturnya pada UUD 1945 menurut C.F.G Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa Undang- Undang Nomor 78 tahun 1958 mengenai penanaman modal asing ini mengadakan beberapa restriksi yang lebih akurat lagi mengenai rancangan Undang-Undang penanaman modal yang telah ditolak oleh parlemen pada tahun 1953.⁵⁸ Undang-Undang Nomor 78 tahun 1978 tentang penanaman modal asing kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1965 dimana motivasi disahkan Undang-Undang ini adalah penanaman modal asing di Indonesia bersifat menarik keuntungan sebanyak mungkin dengan demikian hal maka hal tersebut menjalankan proses penghisapan terhadap rakyat Indonesia.⁵⁹

Adanya perdebatan mengenai penanaman modal asing melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1965 maka penanaman modal asing di Indonesia

⁵⁶ Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.20-25

⁵⁷ An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 37.

⁵⁸ C.F.G Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Binatjipta, Bandung, 1972, hlm. 3

⁵⁹ Ibid. hlm 5

ditiadakan. Kemudian baru diterbitkan Undang-Undang baru Nomor 1 tahun 1967 mengenai penanaman modal asing, yang berlandaskan dengan ekonomi keuangan dan pembangunan dengan pasal 9 yang berbunyi “ Pembangunan ekonomi terutama berarti mengelola kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan pengetahuan keterampilan dan kemampuan berorganisasi.”⁶⁰

Dengan adanya arus globalisasi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka dengan itu mau tidak mau negara di berbagai dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang terlibat dalam berjalannya globalisasi. Keterlibatan negara-negara ini bukan tanpa alasan, melainkan adanya kepentingan bersama dan saling tergantung satu sama lain. Perkembangan ekonomi yang pesat membentuk proses kerjasama dan dalam aktivitas ekonomi secara riil maupun sektor keuangan.⁶¹

Menurut Jhingan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing atau pihak swasta dapat dikatakan juga sebagai penanaman modal dari suatu negara lain atas pemerintah pemilik modal. Setidaknya ada tiga keuntungan dalam investasi untung ini, yang pertama sebagai sarana untuk mengurangi resiko dari adanya pemilik modal dengan melakukan verifikasi investasi, yang kedua, memberikan ruang terbaik untuk membentuk corporate governance, accounting rules, dan legalitas dan integrasi penanaman modal, yang ketiga dengan adanya arus global maka menghalangi

⁶⁰ Ibid. hlm 29

⁶¹ Lutfi Rahmawati. Analisis Faktor yang mempengaruhi masuknya Foreign direct Investment (FDI) negara berkembang dikawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam). Periode 1995-2004. Malang : Universitas Brawijaya press. 2015 hlm 7-9

pemerintah untuk membuat keputusan yang tidak tepat.⁶²

Investasi secara langsung ini membawa modal pada negara dimana akan memperkaya negara bersangkutan, dimana akan mendorong proses pertukaran berbagai bentuk keterampilan dan beberapa teknologi baru akan masuk ke negara penerima modal dimana hal ini akan membantu terbentuknya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Diantara negara-negara Asia Tiongkok adalah negara dengan tuan rumah terbesar untuk investasi secara langsung ini. Dan perusahaan-perusahaan multinasional merupakan bagian terbesar dari *Foreign Direct Investment*.⁶³

Foreign Direct Investment tidak terlepas dari adanya proses hubungan kerjasama ekonomi antara suatu negara dengan negara lainya. Dalam kawasan Asia tenggara perhimpunan *Association of Southeast Asian Nations* adalah geopolitik dan geoekonomi dari negara-negara anggota kawasan Asia tenggara. Maka dengan itu dibutuhkan kerjasama di tingkat regional maupun global. Untuk mendorong ketersediaan modal asing. Maka terciptalah forum perjanjian ekonomi untuk memfasilitasi kepentingan penanaman modal.⁶⁴

Konsep *Foreign Direct Investment (FDI)* digunakan karena dalam percepatan pembangunan nasional dilakukan dengan dua hal yang pertama pemerintah menetapkan anggaranya dan dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran ini tunjukan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana transportasi rehabilitasi pemeliharaan jalan dan

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

jembatan, pembangunan berbagai infrastruktur perumahan, irigasi, dan energi, serta rehabilitasi fasilitas infrastruktur di daerah yang tertimpa bencana alam. Pendekatan kedua adalah pemerintah mengundang pihak swasta untuk bermitra dalam pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai komersial.

Dan yang kedua melalui investasi asing dengan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta karakteristik utama dari skema KPS ialah sektor swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, fokus pada output yang dihasilkan, optimalnya alokasi risiko pemerintah dan pihak swasta, dan kontraknya jangka panjang. Skema KPS memang terlihat menguntungkan, dan relatif dapat diterapkan oleh Pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Hal ini pun didukung dengan fakta bahwa banyak negara di dunia yang telah berhasil menerapkan skema ini untuk mendorong pembangunan infrastrukturnya. Beberapa diantaranya adalah Inggris, Australia, dan Amerika Serikat.

Maka sesuai dengan misi pembangunan nasional Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dimana Indonesia sepakat untuk melakukan kerja sama bilateral dengan Tiongkok untuk memfasilitasi pembangunan nasional yang mana sejalan dengan agenda sabuk ekonomi Tiongkok dalam meningkatkan kerja sama infrastruktur. Maka dengan itu pembangunan nasional sangat berdampak besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Menurut Harrod-Domard dimana investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang, dan disisi lain investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam

pelaksanaan pembangunan ekonomi khusus dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi.

Menurut laporan Bank Dunia, berdasarkan kategori *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara. Sinyal tumbuhnya investasi di Indonesia dapat dirujuk dari laporan *World Investment Report* 2018, yang menggambarkan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) ke Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Bila ditarik rentang waktu kebelakang investasi tumbuh hampir 6 kali lipat dari tahun 2016 ke 2018, yang pada awalnya hanya sebesar 3,92 miliar dollar AS menjadi 23 miliar dollar AS.

Tingkat kemajuan infrastruktur suatu negara mencerminkan efisiensi perekonomian dari negara itu sendiri. Saat kondisi infrastruktur di sebuah negara lemah dapat berakibat pada tingginya biaya logistik untuk kegiatan bisnis, termasuk perdagangan. Selain itu, industri tersebut akan kehilangan daya saing. Pembangunan infrastruktur dan perkembangan makro ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dan menciptakan efek pengganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menyerap peningkatan aliran barang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung dapat berpengaruh kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dengan upaya akselerasi perbaikan dan pembangunan investasi, terutama dalam bidang infrastruktur, yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat

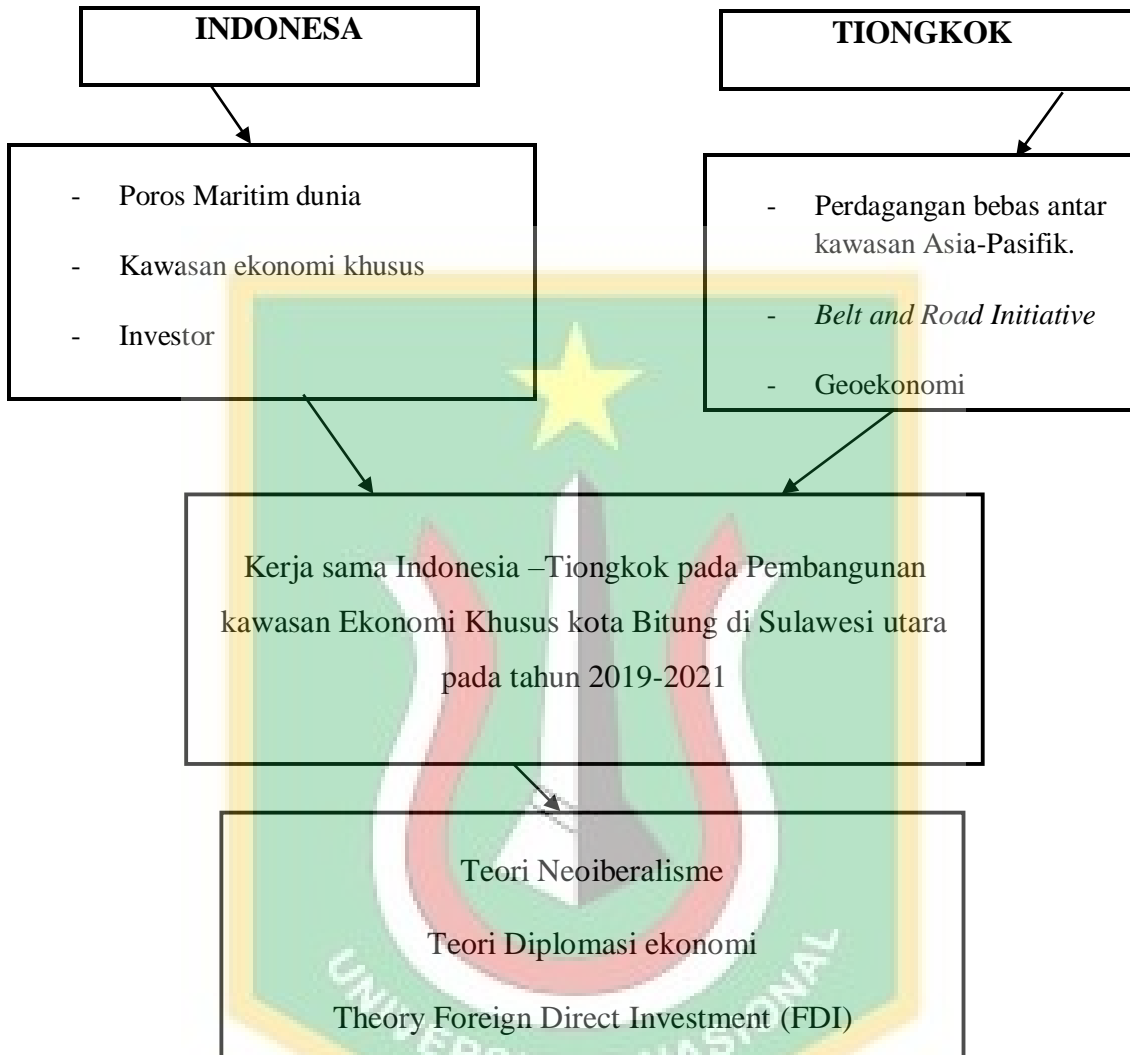
tersambung sentra-sentra ekonomi produksi, investasi infrastruktur yang tepat merupakan poin penting dari produktivitas dan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, sektor swasta masih merupakan investor yang memiliki potensi besar untuk membantu proses percepatan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Landasan utama dari fokus kerja ini adalah untuk membuka aset infrastruktur yang ada ke sektor swasta, yakni melalui produk seperti pasar obligasi proyek dan sekuritisasi utang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerjasama Internasional dibentuk untuk menjalin hubungan yang erat antar negara, hubungan bilateral yang erat akan membentuk suatu proses saling menguntungkan satu sama lain dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun politik serta lebih kompleks lagi. Disinilah hubungan antar kedua negara untuk membentuk suatu kerjasama dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing. Tiongkok adalah negara yang telah lama melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang terutama dalam bidang Ekonomi. Di era globalisasi misalnya negara-negara harus terus berinovasi dalam mengembangkan infrastruktur dan juga sumber daya manusia sangat diperlukan untuk persaingan global yang akan terjadi. Program kerjasama Tiongkok dan Indonesia di bidang Ekonomi berfokus pada pembangunan zona kawasan ekonomi khusus dengan Tiongkok sebagai investor utama dalam melakukan pembiayaan berbagai pembangunan nasional di Indonesia khususnya pelabuhan laut dan tol laut serta perusahaan pengembangan hasil laut.

Secara singkat, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada bagan kerangka

penelitian di bawah ini:



Gambar 2.3 kerangka pemikiran